

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Rwanda Asylum Plan (RAP) sebagai bentuk pengaturan migrasi global yang mereproduksi praktik neokolonialisme melalui relasi kuasa asimetris antara Inggris (Global North) dan Rwanda (Global South). Berdasarkan analisis mendalam pada Bab IV, yang mengaplikasikan konsep neokolonialisme dari Kwame Nkrumah dan Mark Langan, dapat disimpulkan bahwa RAP bukan hanya mekanisme eksternalisasi migrasi untuk mengalihkan tanggung jawab pemrosesan suaka dari Inggris ke Rwanda, melainkan instrumen dominasi tidak langsung yang memperkuat ketimpangan struktural global dan melanggengkan warisan kolonial dalam tata kelola migrasi modern.

Dalam perspektif neokolonialisme, RAP mereproduksi elemen kedaulatan hampa (nominal sovereignty) Rwanda, di mana negara ini secara yuridis diakui sebagai mitra setara, tetapi secara empiris dikompromikan oleh ketergantungan pada dana Inggris dan pengawasan institusional. Inggris memanfaatkan posisi dominannya untuk memengaruhi kebijakan domestik Rwanda melalui kondisionalitas reformasi, seperti verifikasi keamanan, akses bantuan hukum, dan pencegahan *refoulement*, yang semuanya harus memenuhi standar Inggris. Hal ini mengubah kebijakan migrasi Rwanda menjadi ekstensi dari agenda domestik Inggris, memperburuk ketergantungan struktural dan mengurangi otonomi Rwanda dalam pengelolaan pengungsi.

Lebih lanjut, RAP menunjukkan pengaruh eksternal terhadap kebijakan domestik Rwanda melalui mekanisme finansial dan administratif. Pembayaran dana

sebesar £240–290 juta hingga awal 2024, termasuk tranches kondisional berdasarkan milestone reformasi, menciptakan siklus ketergantungan di mana Rwanda harus terus mematuhi arahan Inggris untuk memperoleh dana lanjutan. Ini mencerminkan logika neokolonial di mana kebijakan migrasi Rwanda lebih berorientasi pada kepentingan Inggris seperti pengendalian migrasi ilegal dan pengurangan tekanan politik domestik daripada kebutuhan lokal Rwanda, seperti pembangunan ekonomi berkelanjutan atau perlindungan HAM.

Kooptasi elite lokal menjadi elemen kunci reproduksi neokolonialisme dalam RAP. Di bawah kepemimpinan Presiden Paul Kagame, elite Rwanda dikoptasi melalui aliran dana dan dukungan diplomatik Inggris, yang memperkuat hegemoni internal mereka meskipun menghadapi kritik HAM domestik. Strategi extraversion elite Rwanda menerima RAP sebagai peluang legitimasi internasional dan sumber daya ekonomi membuat mereka bertindak sebagai perantara kepentingan Inggris, mengorbankan kedaulatan empiris Rwanda demi manfaat jangka pendek, seperti dana ETIF untuk proyek pembangunan. Ini selaras dengan kritik Nkrumah bahwa elite lokal menjadi "boneka" yang memprioritaskan agenda asing daripada kesejahteraan rakyat.

Aspek bantuan sebagai kredit berputar (revolving credit) terlihat jelas dalam struktur finansial RAP. Dana Inggris, seperti transfer £120 juta awal hingga total £270 juta ke ETIF, bukan hibah altruistik melainkan investasi strategis yang "berputar" kembali ke Inggris melalui penghematan biaya migrasi domestik dan penguatan narasi politik anti-imigrasi. Pembayaran kondisional per individu (£150.874 untuk integrasi lima tahun) dan tranches bertahap menciptakan siklus ketergan-

tungan, di mana Rwanda menanggung risiko kemanusiaan sementara Inggris meraih keuntungan politik jangka panjang, memperkuat eksploitasi neokolonial tanpa tanggung jawab langsung.

Kontrol finansial dan administratif Inggris semakin memperdalam dominasi ini. Melalui pembiayaan operasional RAP seperti biaya pemrosesan, akomodasi, dan integrasi Inggris menjamin kepatuhan Rwanda dengan standar internasional, sementara lembaga seperti Joint Committee dan Independent Monitoring Committee (IMC) memberikan akses pengawasan tak terbatas, termasuk inspeksi mendadak dan laporan rutin. Ini menciptakan kontrol administratif mirip pengawasan kolonial, di mana Inggris mendikte prioritas kebijakan Rwanda tanpa menghilangkan kedaulatan yuridisnya, sehingga memperburuk kemiskinan struktural dan ketergantungan Afrika.

Akhirnya, penetrasi korporasi dan institusi asing dalam RAP terlihat melalui kontrak bisnis asing dalam infrastruktur migrasi, seperti keterlibatan perusahaan Inggris (misalnya, Galliford Try dan Mitie) dalam fasilitas detensi dan pemrosesan, yang mengalirkan keuntungan kembali ke donor sementara Rwanda menanggung biaya sosial jangka panjang. Penetrasi institusional melalui Joint Committee dan IMC memungkinkan Inggris mengintegrasikan elemen pengawasan ke dalam sistem migrasi Rwanda, membuka jalan bagi pengaruh asing lebih lanjut dan mereproduksi pola ekstraksi neokolonial.

Secara keseluruhan, RAP merepresentasikan neokolonialisme dalam pengaturan migrasi global melalui mekanisme ekonomi, politik, dan administratif yang asimetris, di mana Inggris mengalihkan beban kemanusiaan ke Rwanda sambil mem-

pertahankan dominasi. Ini menjawab pertanyaan penelitian bahwa RAP bukan solusi migrasi yang adil, melainkan kelanjutan kolonialisme dalam bentuk baru, yang memperburuk ketidaksetaraan global dan mengingatkan pada warisan kolonial Inggris di Afrika.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian mengenai Rwanda Asylum Plan sebagai praktik neokolonialisme dalam pengaturan migrasi global, peneliti mengajukan beberapa saran yaitu pertama, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif antara RAP dengan kebijakan eksternalisasi migrasi serupa, seperti offshore processing Australia di Nauru atau kesepakatan migrasi Uni Eropa dengan negara-negara Afrika Utara. Analisis komparatif ini dapat memperkaya pemahaman tentang pola neokolonialisme lintas konteks, dengan fokus pada variasi mekanisme kooptasi elite, kredit berputar, dan penetrasi institusional, sehingga memperkuat kerangka teori neokolonialisme dalam studi migrasi global. Kedua yaitu penelitian mendatang dapat memperluas fokus pada aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil, LSM internasional, dan komunitas lokal di Rwanda, untuk mengungkap dampak nyata RAP terhadap lived experiences pencari suaka dan masyarakat tuan rumah. Pendekatan etnografis atau kualitatif mendalam akan memberikan dimensi humanistik yang lebih kuat, melengkapi analisis struktural neokolonialisme dengan perspektif bottom-up, termasuk isu trauma psikologis, integrasi sosial, dan resistensi lokal terhadap eksternalisasi migrasi.